

BAB II

DESKRIPSI KONFLIK CHINA DAN TIBET

Konflik antara China dan Tibet, sebenarnya telah terjadi sejak berabad-abad lamanya. Namun, konflik ini mulai memanas dan muncul ke permukaan lagi sejak tahun 1950. Konflik ini terjadi akibat adanya pergantian sistem pemerintahan di China yang terjadi pada tahun 1949, setelah Mao Zedong berhasil mengalahkan Chiang Kai-sek sebagai pemimpin China yang beraliran nasionalisme, dan merubah sistem pemerintahan China dari nasionalis ke komunis.

Tibet merupakan salah satu wilayah yang kontra terhadap pemerintahan komunis yang dibawa oleh Mao Zedong, sehingga memunculkan konflik antara keduanya. Masalah ini berhasil mendapat perhatian dunia internasional, berupa tanggapan dan dukungan masing-masing kepada China maupun Tibet. China mempertahankan Tibet, dengan alasan pertahanan integritas teritori dan kedaulatannya atas Tibet, seperti yang dilihat dari faktor hstoris dan faktor geografisnya. Sedangkan rakyat Tibet, menginginkan kemerdekaan dari China, karena mereka merasa Tibet bukanlah wilayah teritori China dan merasa tidak puas atas kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah China atas Tibet.

A. Gambaran Umum China-Tibet

1. Geografis

China adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,6 miliar jiwa pada tahun 2005, yang mayoritas merupakan bangsa Han. China juga adalah negara terbesar di Asia Timur dan ketiga terluas di dunia, setelah Rusia dan Kanada. China berbatasan dengan 14 negara, yaitu: Afganistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam. China juga merupakan sebuah negara yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, militer yang kuat. Kekuatan yang dimilikinya ini, menempatkan China sebagai negara yang memiliki kapabilitas dalam membentuk persepsi dunia.

Tibet adalah provinsi dari China yang merupakan daerah otonomi khusus, yang juga diberi nama Xizang oleh China. Tibet adalah dataran tinggi yang luas di Asia Timur, yang meliputi sebagian besar Daerah Otonomi Tibet dan Provinsi Qinghai di China, serta Provinsi Ladakh di Kashmir. Dataran tinggi ini luasnya 2,5 juta kilometer persegi, dengan ketinggian rata-rata 4.900 meter di atas permukaan laut. Sebagai dataran tinggi terbesar yang letaknya tertinggi di dunia, kawasan dataran tinggi Tibet mendapat julukan sebagai negeri atap dunia.²⁶

Wilayah Tibet dikelilingi oleh barisan pegunungan yang sangat tinggi. Di bagian Barat Laut terdapat Pegunungan Kunlun, yang memisahkan dataran tinggi Tibet dengan Cekungan Tarim, sedangkan di bagian Timur Laut terdapat Pegunungan Qilian yang memisahkan dengan Gurun Gobi, di bagian Selatan

²⁶Baihaqi Falaq . 2010. *konflik China-Tibet dan Terjadinya Pelanggaran HAM Oleh China Tahun 2000-2008*. Penerbit UMY. Hal 27.

terdapat Sungai Yarlung Tsangpo, di bagian Timur dan Tenggara dataran tinggi Tibet terdapat daerah perbukitan yang merupakan hulu bagi Sungai Salween, Sungai Mekong dan Sungai Panjang di Selatan Provinsi Sichuan. Di sebelah Barat, dataran tinggi Tibet berbatasan dengan barisan pegunungan Karakoram di Utara Kashmir.²⁷

Tibet juga berbatasan dengan negara-negara di Selatan dan India yang merupakan negara saingan China. Oleh sebab itu, Tibet menjadi zona penahan (*buffer zone*) terhadap keamanan wilayah China, untuk menghadapi ancaman yang datang dari negara pesaing China, yang memiliki konflik dengan China.

2. Ekonomi

China mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri China. Sejak akhir tahun 1978, kepemimpinan China telah memperbaharui ekonominya, dari ekonomi terencana Soviet ke ekonomi yang berorientasi pasar, tetapi masih dalam kerangka kerja politik yang kaku dari Partai Komunis.

Untuk itu, para pejabat meningkatkan kekuasaan pejabat lokal dan memasang manajer dalam industri, mengizinkan perusahaan skala kecil dalam jasa dan produksi ringan, dan membuka ekonomi terhadap perdagangan asing dan investasi.²⁸ Ke arah ini, pemerintah mengganti ke sistem pertanggungjawaban para keluarga dalam pertanian, dalam penggantian sistem lama yang berdasarkan penggabungan, menambah kuasa pegawai setempat dan pengurus kilang dalam industri, membolehkan berbagai usahawan dalam layanan dan perkilangan ringan,

²⁷<http://www.socaltibet.org/galleries/>. Diakses 11 Januari 2013.

²⁸Biro Statistik Negara

China http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20100121_402615505.htm.

Diakses 12 Januari 2013.

juga membuka ekonomi pada perdagangan dan pelabuhan asing. Pengawasan harga juga telah dilonggarkan, hal ini mengakibatkan China daratan berubah dari ekonomi terpimpin, menjadi ekonomi campuran.

Pemerintah China menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi dalam pembangunan ekonominya. Memperkenalkan sistem manajemen baru, untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah China juga, memfokuskan diri dalam perdagangan asing, sebagai kendaraan utama untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, mereka mendirikan lebih dari 2000 Zona Ekonomi Khusus (*Special Economic Zones, SEZ*), dimana hukum investasi diregangkan untuk menarik modal asing. Hasilnya adalah PDB yang berlipat empat sejak 1978.

Tahun 1999 dengan jumlah populasi 1,25 miliar orang dan PDB hanya \$3.800 per kapita, China menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli. Perkembangan ekonomi China, diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah China.²⁹ Ini menjadikan China, sebagai fokus utama dunia pada masa kini. Hampir semua negara, termasuk negara Barat, ingin sekali menjalin hubungan perdagangan dengan China. Akan tetapi, dibalik keberhasilan ekonomi China ini, terdapat jurang pengagihan kekayaan di antara pesisiran pantai dan kawasan pedalaman China masih amat besar. Untuk menandingi keadaan yang berpotensi mengundang bahaya ini, pemerintah melaksanakan strategi Pembangunan China Barat pada tahun 2000.

²⁹China overtakes Japan as world's second-biggest economy", 14 February 2011. *BBC News*. Diakses 12 Januari 2013.

Sejak tanggal 1 Januari 2002, China telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Diperkirakan oleh CIA pada tahun 2002, bahwa agrikultur menyumbangkan sebesar 14,5% dari PNB China, industri dan konstruksi sekitar 51,7% dan jasa sekitar 33,8%. Pendapatan rata-rata pedesaan sekitar sepertiga di daerah perkotaan. Pada 2003, PDB China dari segi *purchasing power parity* mencapai \$6,4 trilyun, hal ini menjadikan China sebagai negara terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2003, laporan pertumbuhan ekonomi resmi China, naik menjadi 9,1%. Karena adanya jurang perbedaan antara China daratan dengan kawasan pedalaman China, sehingga pemerintah China mengadakan pembangunan kembali China Timur Laut pada tahun 2003 dan Kebangkitan Kawasan China Tengah pada tahun 2004, semuanya bertujuan untuk membantu kawasan pedalaman China turut membangun bersama.³⁰

Salah satu kawasan pedalaman yang memiliki kemajuan ekonomi yaitu wilayah Tibet. Wilayah Tibet merupakan wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, misalnya seperti minyak, uranium, lithium, khrom, tembaga, boraks, besi.³¹ Namun, sebelum masuknya PKC ke Tibet, Tibet masih merupakan negeri miskin. Kemiskinan yang terjadi di Tibet adalah akibat feodalisme keagamaan yang masih tersisa sejak berabad-abad, dimana para kalangan aristokrat dan para Dalai Lama hidup enak di istana, sedang kebanyakan rakyat di luar istana menderita kekurangan.

³⁰Antisipasi Pelemahan Ekonomi China

<http://swa.co.id/my-article/antisipasi-pelemahan-ekonomi-cina>.Diakses 14 Januari 2013.

³¹Ekonomi Tibet Tumbuh Pesat

http://www.analisadaily.com/news/read/2013/01/05/98267/ekonomi_tibet_tumbuh_pesat/#.UQc-Kq6GyZQ.Diakses 14 Januari 2013.

Namun, setelah masuknya PKC ke Tibet pada tahun 1959, pertumbuhan ekonomi yang ada di Tibet tumbuh dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan para wakil Kongres Rakyat Nasional (KRN) dan anggota Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok yang tengah menghadiri sidang tahunan di Beijing, pada hari peringatan genap 50 tahun reformasi demokratik tanggal 28 Maret 2009. Mereka menyatakan bahwa sistem ekonomi dan sosial Tibet, mengalami perubahan yang maha besar. Rakyat Tibet mengalami kehidupan baru yang bebas, sama rata dan harmonis.

Setelah melihat kemajuan yang pesat pada Tibet, pemerintah China lebih gencar untuk terus meningkatkan kemajuan di Tibet. Hal ini dibuktikan pada kemajuan total volume PDB Tibet tahun 2010, menembus 50 miliar renminbi dan pada tahun 2011 mencapai 60,5 miliar renminbi. PDB Tibet telah mengalami pertumbuhan sebesar 10 miliar renminbi dalam tiga tahun terakhir. Ketua Daerah Otonom Tibet, Padma Choling pada tanggal 3 Januari 2013, mengatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Tibet tahun 2012 naik 12%, yaitu mencapai 70,1 miliar renminbi. PDB Tibet telah mengalami pertumbuhan lebih dari 10 % selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan volume eksporimpor naik 170 % dan pendapatan rata-rata petani dan peternak serta penduduk kota, masing-masing naik 15 % dan 11 %.

Para kaum proletar di Tibet yang dahulu memiliki kehidupan yang sangat buruk sebelum masuknya PKC, mengakui bahwa setelah masuknya PKC ke Tibet tahun 1959, khususnya sejak diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar, di bawah bantuan pemerintah China, kehidupan

mereka semakin baik.³² Fakta pertumbuhan pesat yang terjadi di Tibet ini, sangat mempengaruhi pandangan dan menjadi pertimbangan bagi dunia internasional dalam mendukung China dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Tibet.

3. Politik

Secara resmi, China masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini adalah karena sejarahnya. China merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun, dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh konfusianisme.

Setelah masa dinasti terakhir China berakhir, yaitu dinasti Qing pada tahun 1911, Sun Yat-sen mendirikan Republik China pada tahun 1912 dengan Sun Yat-sen sebagai presiden pertamanya. Di bawah pemerintahan Sun Yat-sen, Republik China mengalami perubahan yang signifikan dan pada pemerintahannya, Sun Yat-sen dapat menjalin hubungan yang baik antara Guomintang dan Partai Komunis. Sun Yat-sen sebagai pendahulu Chiang, sangat disukai dan dihormati oleh kelompok komunis. Namun, setelah wafatnya Sun Yat-sen pada tahun 1925, Chiang Kai-shek menggantikan Sun menjadi pemimpin GMD.³³

³²Sistem Ekonomi Dan Politik Tibet Mengalami Perubahan Besar Selama 50 Tahun Diberlakukannya Reformasi Demokratik. http://www.cic.mofcom.gov.cn/ciweb/ci/info/Article.jsp?a_no=175797&col_no=497 Diakses 15 Januari 2013.

³³Perkembangan Ideologi Dan Sistem Politik Cina. <http://www.anneahira.com/sistem-politik-cina.htm>. Diakses 16 Januari 2013.

Hingga Setelah Perang Dunia II, terjadi perang saudara antara para pendukung Partai Komunis China dan Guomintang (Nasionalisme) China, yang terjadi pada tahun 1946 hingga tahun 1949. Perang saudara tersebut, diakhiri dengan kekalahan GMD dan dengan kemenangan pihak Komunis. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat China dan mendirikan sebuah negara Komunis di China.³⁴ Partai Komunis China (PKC) dan Guomintang (GMD), dahulunya memiliki hubungan yang baik. Kedua partai tersebut pernah bergabung melawan penjajahan Jepang di tahun 1937. Namun, setelah perang dengan Jepang selesai, dikarenakan perbedaan ideologi komunis dan kapitalis, kedua partai tersebut berseteru.

Setelah kekalahan GMD oleh Partai Komunis, Pemerintah Republik China pindah ke Pulau Taiwan dan mendirikan Ibukota sementara di Taipei, ia terus menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah seluruh China, termasuk China daratan yang sah. Sementara pada masa yang sama, Partai Komunis China di bawah kepemimpinan Mao Zedong mengumumkan bahwa mereka sebagai pengganti kepemimpinan Guomintang di seluruh negara China (termasuk Taiwan) dan pemerintahan nasionalis di Taiwan tidak sah. Dari pendiriannya hingga pemindahannya ke pulau Taiwan, Republik China telah dikatakan sebagai satu produk Guomintang (nasionalis), sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan Republik, sekalipun partai itu tidak lagi memerintah di Republik China.

³⁴Ririn Darini, M.Hum. 2010. *Garis Besar Sejarah China Era Mao*. Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta. Hal 20.

Meskipun pada pemerintah Mao Zedong terdapat gerakan yang mengarah pada liberalisasi, seperti pemilu yang diadakan di peringkat kampung dan sebagian Badan Perwakilan, yang menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, akan tetapi pemerintah China tetap dikawal oleh Partai Komunis China, dalam pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. PKC mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat China yang dipertimbangkan oleh RRC.³⁵ Cara ini, lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap militer dan sistem pemerintahan negara. Fungsi badan perhubungan khusus ini, lebih kepada urusan eksternal CPP.

Dalam pemerintahan RRC, nasionalisme juga masih diajarkan pada kaum muda. Namun hal itu hanya sebagai pemahaman dasar yang nantinya diarahkan untuk melegitimasi Partai Komunis China dan meskipun sekarang pemerintah China telah menerapkan kebijakan ekonomi terbuka, akan tetapi hingga sekarang, pemerintahan China masih menerapkan sistem sentralisme pada pemerintahan pusat. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya otokrasi dalam pemerintahan dan ajaran kebudayaan konfuisme yang masih melekat pada struktur masyarakat dan tiap individu.

Meskipun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya. Namun pada masa yang sama,

³⁵Sistem Pemerintahan RRC

<http://tugaskkpismkn2pwr.wordpress.com/2011/09/03/sistem-pemerintahan-rrc/>.

Diakses 16 Januari 2013.

pemerintah mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan ekspresi pribadi dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil. Pemerintah China juga secara berangsur menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989 dan pemberontakan yang dilakukan Tibet.

Sedang dalam masalah politik yang ada di Tibet, pemerintah China menerapkan sistem politik yang sama dengan sistem politik yang ada di China daratan, karena pemerintah China beranggapan bahwa wilayah Tibet masih merupakan wilayah teritori China.

Sebelum masuknya PKC di Tibet pada tahun 1950, Tibet yang dipimpin oleh Dalai Lama, berada dalam masyarakat tani hamba feodal. Kelas yang berkuasa pada masa pemerintahan Dalai Lama terdiri dari pejabat, bangsawan dan Biksu lapisan atas di kuil, yang jumlahnya hanya 5% dari penduduk Tibet. Mereka memiliki kehidupan yang layak dan memiliki segalanya. Sedangkan para tani hamba dan budak yang jumlahnya sebanyak 95% dari penduduk Tibet, justru tidak memiliki alat-alat produksi untuk menunjang pekerjaannya, kebebasan pribadi dan kehidupan mereka sangat sengsara.

Dengan melihat kondisi pemerinthan feodalisme di Tibet, pemerintah China merasa bahwa sistem pemerintahan tersebut merupakan kriminalisasi yang melanggar hak asasi manusia para kaum proletar. Sehingga untuk menghentikan kriminalitas tersebut, pemerintah China mengajukan opini mereka untuk melakukan persetujuan pembebasan rakyat Tibet. Namun, pemerintah Tibet tidak

menyetujui opini yang diberikan oleh pemerintah China, tetapi dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan antara kedua belah pihak, perubahan politik ini dimenangkan oleh pemerintah China. Maka dengan itu, pemerintah China dan Pemerintah Daerah Tibet, menandatangani persetujuan mengenai *Cara Pembebasan Damai Tibet* pada tahun 1951. Para rakyat Tibet yang dulunya merupakan kaum Ploletar, sangat antusias menerima perubahan tersebut. Mereka merasa perubahan yang dibawa oleh pemerintah China adalah perubahan politik yang riil.

Pakar Pusat Penelitian Tibetologi, Tanzen Lhundrup mengatakan, selama 30 tahun sejak diadakannya reformasi dan keterbukaan, Tibet telah memperoleh manfaat dan perkembangan yang sungguh-sungguh baik di bidang infrastruktur, maupun taraf kehidupan, kondisi pengobatan dan syarat pendidikan rakyat.³⁶ Banyak bukti manfaat yang diperoleh Tibet, salah satunya yaitu prestasi reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar. Keterbukaan ini menjadikan kebebasan warga negara asing untuk masuk dan melihat-lihat ke Tibet.

B. Munculnya Gesekan Politik antara China-Tibet

Sejak berabad-abad lamanya, Tibet telah menjadi lambang status kebanggaan kekaisaran China. Penguasa Tibet memberikan hadiah-hadiah bergengsi kepada China, sebagai imbalan mereka tidak diganggu gugat. Meskipun Kaisar China mengirimkan utusannya ke Lhasa, tapi mereka jarang mencampuri

³⁶Klik Dalai Mencoba Mencapai Maksud Politiknya Melalui Kekerasan.
<http://indonesian.cri.cn/1/2008/03/27/1@79535.htm>. Diakses 18 Januari 2013.

urusan pribadi Tibet. Bahkan jika Tibet mendapatkan ancaman dari negara-negara lain, pemerintah Tibet bahkan meminta bantuan kepada penguasa China.³⁷

Gesekan politik antara China dan Tibet sebenarnya telah dimulai pada abad ke-7, ketika Tibet sudah membentuk kerajaan dibawah pemerintahan Songtsen Gampo, yang berkuasa antara tahun 755 sampai tahun 797.³⁸ Sedangkan China berada di bawah pemerintahan Dinasti Tang. Pada masa itu, Tibet sebagai wilayah yang berkembang, berhasil memperluas wilayahnya sampai wilayah China, yaitu Xinjiang, Kashmir, Amdo dan Kham. Perselisihan politik yang pertama terjadi antara China dan Tibet ini menyangkut masalah perbatasan. Namun, perselisihan ini berakhir dan dapat diselesaikan melalui serangkaian perjanjian yang dilaksanakan pada abad ke-9. Adapun isi dari perjanjian ini yaitu mengenai daerah perbatasan yang ditandai dengan tiga pilar yang ditancapkan di Gungu Meru, Lhasa, dan terakhir di Chang'an, yang pada saat itu merupakan Ibukota China.³⁹

Persengketaan berlanjut dengan kedatangan penjajahan Inggris ke Tibet pada akhir abad ke-19, yang mulai membuka akses kekuasaannya di Tibet, tetapi pemerintah China menolak hal tersebut. Penolakan China inilah yang memicu konflik antara China dan Tibet muncul kembali.⁴⁰ Pada masa itu, para penjajahan Inggris memasuki wilayah Tibet dan ingin membuka jalur akses kekuasaan

³⁷Status Tibet Yang Diperdebatkan.

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&jd=Status+Tibet+yang+Diperdebatkan&dn=20080321035530>. Diakses 22 November 2013.

³⁸Sayomiki, Nurani. *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, Dan Politik Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*. Garasi, 2008. Hal 26.

³⁹*Ibid.* Hal 27.

⁴⁰Suharmingtyas. *Hubungan Cina-Tibet dan Taiwan*. Diakses 22 November 2013.

Inggris di Tibet. Keinginan Inggris ini dilegalkan dengan diadakannya persetujuan *The Anglo-Tibet Convention* pada tahun 1904. Dengan sikap penolakan pemerintah China dengan adanya kependudukan Inggris di wilayah Tibet tersebut. Hingga akhirnya, dibentuklah kesepakatan *The Anglo-China Convention* pada tahun 1906. Isi dari kesepakatan ini yaitu menyangkut pemberian legitimasi kepada China yang saat itu di bawah pimpinan Dinasti Qing, untuk berkuasa penuh di seluruh kawasan Tibet.

Setelah kemenangan China atas Tibet, China di bawah kuasa Dinasti Qing menguasai Tibet. Sebagai bentuk kekuasaan China atas Tibet, pada tahun 1910 pemerintah China mengirim tentaranya ke Tibet dan menggulingkan Dalai Lama dari kekuasaannya. Namun, dengan ketidakpuasan rakyat Tibet atas pemerintahan China, sehingga rakyat Tibet melakukan pemberontakan terhadap tentara China yang ditempatkan di Tibet. Setelah itu, pemerintah China yang bertempat di Tibet, dipaksa untuk menyetujui sebuah perjanjian penyerahan dan pengusiran tentara China dari Tibet Tengah. Untuk menghentikan pemberontakan rakyat Tibet, pemerintah China memberikan pernyataan kemerdekaan secara *de facto* kepada Tibet pada tahun 1912. Namun, meskipun dengan adanya kemerdekaan Tibet secara *de facto* dari China, tetapi pemerintah China seakan-akan masih memperlakukan Tibet sebagai bagian dari negaranya.⁴¹

Akibat ketidakpuasan rakyat Tibet atas sikap pemerintah China yang seakan-akan masih memperlakukan Tibet sebagai bagian dari negaranya, pada awal tahun 1913, Dalai Lama mengeluarkan selebaran yang menginformasikan

⁴¹Nurani Sayomukti. *Revolusi Tibet : Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*. Garasi, 2008. Hal 38.

kecamannya kepada seluruh rakyat Tibet, terhadap niat China untuk menguasai Tibet dan menyatakan bahwa Tibet adalah sebuah negara yang kecil, beragama dan merdeka.

Pada tahun 1946 hingga tahun 1949, terjadi perang saudara diantara para pendukung PKC dan GMD.⁴² Perang saudara tersebut, diakhiri dengan kekalahan GMD, kemudian pemerintahan Republik China di bawah Chiang Kai-sek dengan pasukannya yang tersisa kabur ke pulau Taiwan. Partai Komunis China (PKC) dan Guomintang (GMD), dahulunya memiliki buhungan yang baik, kedua partai tersebut pernah bergabung melawan penjajahan Jepang di tahun 1937. Namun, setelah perang dengan Jepang selesai, dikarenakan perbedaan ideologi komunis dan kapitalis, kedua partai tersebut berseteru.⁴³

Pada tahun 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China. Pada awal berdirinya, kebijakan kepemimpinan komunis China menekankan sikap defensive sebagai prioritas utama China dalam hubungan internasionalnya. Sikap tersebut yaitu: 1) Pertahanan melawan serangan militer atau dominasi luar negeri. 2) Penyatuan kembali daerah-daerah terpencil dan terasing (terutama Tibet, Xinkiang, dan Mongolia dalam). 3) Penggabungan Taiwan dalam struktur administrative nasional. 4) Pencegahan campur tangan non militer asing dalam urusan-urusan dalam negeri China. 5) Pembangunan kembali

⁴²Walter S. Jones. 1992. *Logika Hubungan Internasional : persepsi Nasional*. Jakarta: gamedia Pustaka Utama. Hal 176.

⁴³Angga Rahmadi Wijaya, 2007. *Dampak Konsep Satu China Terhadap Keberadaan Taiwan*. Skripsi FISIP HI Universitas Pasundan. Hal 40.

respek/sikap hormat internasional, dan mencapai peranan memimpin dalam urusan-urusan regional dan internasional.⁴⁴

Oleh sebab itu sesuai dengan salah satu sikap defensive China pada poin kedua, Mao Zedong mengumumkan kecamannya atas kemerdekaan Tibet dan kembali menekankan kedaulatannya atas wilayah Tibet.⁴⁵ Namun, rakyat Tibet menolak sikap pemerintah China tersebut dan melakukan perlawanan. Tibet menyatakan ancaman dan perlawanannya dalam pengumuman yang diberitakan oleh Radio Beijing, bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China, harus membebaskan semua wilayah China, termasuk Tibet, Xinjiang, Hainan dan Taiwan.

Kecaman atas kemerdekaan Tibet dilakukan karena, Tibet menolak perubahan ideologi pemerintahan yang dibawa oleh Mao Zedong. Tibet lebih memilih untuk tetap pada ideologi pemerintahan sebelumnya, di bawah pimpinan Chiang Kai-sek yang berbentuk nasionalis. Rakyat Tibet mengatakan bahwa, kebijakan yang dibawa oleh Mao Zedong, melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut, mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut. Adanya perbedaan pendapat dan pandangan terhadap sistem pemerintahan Nasionalis dan Komunis ini, di mata Mao Zedong merupakan suatu ancaman bagi pemerintahannya, keutuhan wilayah dan kesejahteraan negaranya. Hal ini mengakibatkan Mao mengancam kemerdekaan wilayah-wilayah yang menentang

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Konflik China-Tibet Dari Sudut Pandang Hubungan Internasional.

<http://www.scribd.com/doc/45094896/konflik-China-Tibet-dari-sudut-pandang-hubungan-internasional>. Diakses 22 Januari 2013.

sistem pemerintahannya, salah satunya wilayah Tibet. Disinilah awal masalah China dan Tibet mulai memanas kembali. Hal ini diakibatkan karena pemerintahan China yang menginginkan rakyat Tibet untuk menyetujui dan patuh pada sistem pemerintahannya dan mengakui bahwa Tibet merupakan wilayah teritori China. Pemerintah China menanggapi ancaman ini, sebagai bagian dari pemberontakan dan perlawanan dan tentunya hal ini akan sangat menghambat sistem pemerintahan yang ada di China.

Akibat ketidaksetujuan rakyat Tibet atas pernyataan pemerintah China, pada tanggal 2 November 1949, Menteri Luar Negeri Tibet mengajukan perundingan ke Mao Zedong, untuk menyelesaikan semua sengketa territorial. Ajuan perundingan Tibet tersebut, melibatkan negara lain yaitu: India, Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam perundingan tersebut, delegasi Tibet mengajukan dua proposal kepada pemerintah China, yaitu Tibet menuntut agar pemerintah China tidak ikut campur dalam masalah pertahanan nasional Tibet. Selain itu juga, Tibet harus diakui sebagai bagian dari China dan memiliki otonomi khusus. Menanggapi hal ini, pemerintah China memberikan pernyataan bahwa pemerintah China tidak akan mengganggu dan melanggar integritas teritori Tibet, apabila Tibet juga mentaati perjanjian, dengan tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan terhadap militer China, terutama di wilayah perbatasan. Namun, pemerintah Tibet menolak usulan China tersebut. Karena perundingan tersebut tidak mencapai kata sepakat dan tidak memuaskan kedua belah pihak, akhirnya perundingan tersebut dihentikan.

Sebagai kelanjutan pengajuan perundingan yang diajukan Tibet, pada tanggal 17 November 1950, Tibet mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, untuk tidak lagi mengintervensi masalah China dan Tibet. Surat tersebut juga berisikan, Tibet mengatakan bahwa, Tibet tidak dalam posisi untuk menolak China, justru Tibet telah menyepakati untuk melakukan negosiasi, mengenai persyaratan yang telah diajukan pemerintah China.⁴⁶

Sebagai hasil dari perundingan tersebut, maka tentara militer China mendirikan pangkalan militernya di wilayah perbatasan Tibet. Pada pertengahan tahun 1950, ketidakpuasan terhadap pendudukan China menimbulkan pecahnya perlawanan bersenjata. Tentara merah China melakukan penyerbuan ke wilayah Tibet, tepatnya di kota Lhasa yang merupakan Ibukota Tibet. Pada tahun 1951, China berhasil menguasai kota Lhasa setelah pemberontakan yang dilakukan oleh tentara China selama satu tahun, dan berhasil menurunkan Dalai Lama dari kursi pemerintahannya. Pada saat itu, pemerintah China meminta agar Dalai Lama mengakui bahwa Tibet merupakan bagian dari China. Namun, Dalai Lama akan menyatakan kesetujuannya untuk bergabung dengan China, apabila pemerintah China memberikan hak otonomi khusus kepada Tibet sebagai persyaratan bergabungnya Tibet ke China. Namun pada saat itu, pemerintah China tidak dapat memberikan hak otonomi tersebut kepada Tibet karena pertimbangan dalam berbagai hal.⁴⁷

Tindakan pemerintah China ini, membuat Dalai Lama tidak setuju dan merencanakan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan China.

⁴⁶Dalai Lama. *Taman Dan Teman Saya*. New York, Edisi Keempat. Hal 95.

⁴⁷Tao, Cheng. *Negara Bangsa (jilid 3: Asia)*. Bandung : PT Nuansa, 2005. Hal 256

Pemberontakan ini pecah pada tahun 1956 di Kham dan Amdo, daerah yang terjadi basis reformasi sosialis, perang gerilya ini kemudian menyebar ke wilayah Tibet dan berlangsung hingga 6 tahun lamanya. Hingga pada tahun 1959, para rakyat Tibet berbaris di jalan-jalan kota Lhasa untuk melakukan pemberontakan dan menyatakan kemerdekaan Tibet. Hal ini dilakukan, karena adanya laporan bahwa Dalai Lama akan diculik oleh tentara China. Brikadepun dipasang di jalan-jalan Lhasa, tentara China terpaksa mulai membentengi posisi di dalam dan sekitar Lhasa dalam persiapan perlawanan pada para pemberontak dan gerilyawan Tibet. Peperangan ini berlangsung selama dua hari dengan kekalahan para gerilyawan Tibet, dikarenakan kekalahan kekuatan dan minimnya persenjataan. Pada pemberontakan itu Dalai Lama dan para menteri Tibet berhasil meloloskan diri dari tawanan tentara China. Upaya pelolosan ini dipimpin oleh GampoTashi, setelah itu Dalai Lama mendirikan kepemimpinannya di India bagian utara hingga sekarang.

Persyaratan hak otonomi yang diajukan Tibet baru diberikan pada tahun 1965, setelah berbagai demonstrasi yang terjadi di Tibet. Pemerintah China dan Tibet melakukan perjanjian yang salah satu isinya menjadikan Tibet sebagai wilayah otonomi khusus di bawah pemimpin tradisional Tibet yang dipimpin Dalai Lama. Meskipun dengan adanya kesepakatan pemberian otonomi terhadap Tibet, tetapi pemerintah China dan Tibet tetap mengalami ketegangan.

Ketegangan ini dikarenakan pemerintah China mengingkari isi perjanjian dengan membatasi pemerintahan yang dipegang Dalai Lama. Alasannya, karena pemerintah China ingin menghapus sistem pemerintahan Dalai Lama yang

bersifat feodal dan mengubahnya menjadi sistem pemerintahan komunis, sebagaimana yang ada pada sistem pemerintahan China.⁴⁸ China sebagai negara komunis, beranggapan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Dalai Lama, merupakan hal yang sangat bertentangan dan melawan sistem pemerintahan komunis yang ada di China, yang hal ini akan sangat mengganggu keutuhan wilayah dan keamanan dalam negara dengan adanya sekelompok orang yang menentang pemerintahan China. Hal ini tentu merupakan sumber bahaya separatisme yang tentunya harus dihapuskan.

Persengketaan antara China dan Tibet, terus berlanjut dengan berbagai masalah. Namun, persengketaan tersebut tidak disorot oleh dunia internasional, sehingga persengketaan-persengketaan yang terjadi antara keduanya tidak banyak diketahui oleh dunia internasional. Hingga pada tahun 2008, tepatnya pada saat dilaksanakannya *Olimpiade Beijing*, akibat ketidakpuasan rakyat Tibet terhadap sikap pemerintah China, rakyat Tibet melakukan unjuk rasa untuk memperingati 49 tahun kegagalan warga Tibet dalam melawan aturan pemerintah China pada tahun 1959, yaitu penghapusan budaya, agama, dan seni asli Tibet.⁴⁹ Pemberontakan ini juga dilakukan untuk memperingati kegagalan pemerintah China menundukkan Tibet, serta pengusiran Dalai Lama ke pengungsian. Untuk menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Tibet tersebut, pemerintah China menaggapinya dengan menggunakan kekuatan militernya.

⁴⁸Charity ega maharani. Tindakan represif pemerintah cina terhadap wilayah tibet dengan migrasi etnis han dan rekayasa sosial, 2009. Penerbit UMY. Hal 17

⁴⁹Kerry, Dumbaugh. *CRS Report for Congress: Tibet Problems, Prospect, U.S. Policy*. United State, 30 Juli 2008.

Hal ini dilakukan pemerintah China karena mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan momentum penyelenggaraan Pesta Olahraga Dunia atau *Olimpiade Beijing* tahun 2008, para demonstran Tibet ingin merusak citra internasional China dan ingin menarik lebih banyak perhatian dari dunia internasional. Mereka membuat rekayasa tentang adanya persetujuan antara Etnis Tibet dan Han, yang memancing tindakan pemerintah China untuk menindak dan menguasai kekacauan, pembakaran, perusakan, perampokan, pembunuhan yang dilakukan oleh Etnis Tibet pada Etnis Han. Namun, tindakan perlawanan rakyat Tibet ini tidak disetujui oleh Dalai Lama sebagai pemimpin Tibet. Alasannya, Dalai Lama masih berpegang pada prinsipnya bahwa aksi protes kepada China harus dilakukan secara pasif, jauh dari kekerasan dan pertumpahan darah.

Pemberontakan ini, mengundang perbedaan pandangan antara negara-negara internasional tentang tindakan keras pemerintah China yang menanggapi pemberontakan ini. Banyak kritikan datang dari masyarakat internasional yang menyatakan bahwa, pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM dengan menggunakan kekuatan militer yang dimilikinya terhadap rakyat Tibet.

Menteri luar negeri AS, menghimbau agar pemerintah China membuka perbincangan dengan Dalai Lama dan lebih menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan di wilayah religius ini. Seorang pejabat tinggi Inggris mengatakan, pemerintah China telah mengambil tindakan beresiko dengan merusak citranya sebagai tuan rumah Olimpiade di Beijing, kalau masalah di Tibet memuncak. Namun, Rusia sebagai sekutu China, berharap China akan